

Perubahan Desa dan Penerapan Kebijakan Orde Baru di Blitar Barat (1969-1983 an)

Muhammad Rifki Amirudin, Grace Tjandra Leksana

Department Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang

Email: muhammad.rifki.2007326@students.um.ac.id

Abstract

This research aims to narrate the direction of village development policies during the New Order era as well as the forms of implementation of President Soeharto's government policies in West Blitar from 1969 to 1983. This research was motivated by the emergence of West Blitar as one of the regions that was successful in implementing modernization and development programs at the beginning of the New Order government. The modernization program that was preceded by the purge of communists is an interesting paradox to study. The method used in this research was a historical research method which includes topic selection, heuristics, criticism, interpretation and historiography using a social history approach carried out with interpretation from archives, newspapers and articles. This research found that the main focus of the New Order government's development in West Blitar from 1969 to 1983 was in the areas of food and shelter. During this period, the government succeeded in improving agriculture, controlling population, and building several other supporting infrastructure. This success cannot be separated from the authoritarian and top-down New Order government style.

Keywords: *New Order, Modernization program, West Blitar*

Pendahuluan

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 59 Tahun 2017 dan Perpres No 111 Tahun 2022 pemerintah meluncurkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. program ini menysasar dalam beberapa bidang seperti kesejahteraan, pangan, kesehatan, infrastruktur, keamanan serta bidang-bidang kesejahteraan desa lainnya.¹ Permasalahan desa yang cukup kompleks terutama dalam bidang sosial ekonomi membuat pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada desa. disamping itu, desa merupakan indikator serta pendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, apabila permasalahan desa di Indonesia dapat teratasi, maka sebagian besar tantangan pembangunan di Indonesia akan terselesaikan.²

Jika menilik pada sejarah, pada dasarnya posisi penting desa sudah menjadi ujung tombak kebijakan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Pada pemerintahan Sukarno, wilayah desa diposisikan sebagai sebuah negara kecil. Melalui UU No 19 Tahun 1965, Presiden Sukarno membentuk desa praja atau

¹ D. L. Pristiandaru, "SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, Dan Tujuannya.," Kompas.Com. <https://Lestari.Kompas.Com/Read/2023/06/08/120000486/Sdgs-Desa--Pengertian-Peraturan-Dan-Tujuannya?Page=all>, 2023.

² A. H. Iskandar, *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia., 2020).

daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah desa dapat mengelola pemerintahannya sendiri berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat. Namun perubahan terjadi setelah pemerintahan Presiden Soeharto. Desa yang semula diberikan otonomi penuh, melalui UU No 5 Tahun 1979 pemerintah berusaha menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa yang ada di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara top-down, secara tidak langsung juga akan membuat status hukum adat menjadi runtuh³

Sebagai bentuk komitmen Presiden Soeharto dalam upaya pembangunan desa, pemerintah merintis program jangka panjang lima tahunan yang biasa disebut dengan Repelita. Program Repelita dilaksanakan dalam 6 tahap yang dimulai dari tahun 1969 hingga 1999. Pada tahap Repelita pertama hingga ketiga (1969-1984) fokus utama pembangunan pemerintah adalah pertumbuhan GNP dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Sementara itu, pada Repelita ke empat hingga ke enam (1984-1999) fokus pembangunan pemerintah adalah pada investasi dan infrastruktur di wilayah perkotaan.⁴ Dalam upaya menjalankan Repelita di tingkat desa Presiden Soeharto menjalankan beberapa program pangan. Dalam hal pertanian misalnya, Presiden Suharto menggencarkan program revolusi hijau untuk merubah sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern. Adanya program ini secara tidak langsung menggerus kearifan lokal serta menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah pusat.⁵ Meskipun begitu, atas adanya program ini pemerintah dapat mencapai swasembada beras. Bahkan atas prestasinya Presiden Soeharto dapat meraih medali emas dari FAO berupa medali “Indonesia: From Rice Importer to Self Sufficiency”.⁶

Di balik penghargaan yang diraih oleh presiden, terdapat mekanisme yang berjalan di tingkat akar rumput yang membuat program ini mendapat apresiasi dari dunia internasional. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi program-program pembangunan Orde Baru melalui studi kasus di Blitar Barat. Ada beberapa alasan mengenai pemilihan lokasi ini. Pertama Blitar Barat merupakan salah satu target operasi anti-komunis di tahun 1965 dan 1968.

³ Djaenuri, A Zayanti Mandasari and M. N Alamsyah, “Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi”, 02 ed., vol. 03, n.d.

⁴ S P. Syahrie, “Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi.,” *Jurnal Sejarah Lontar* 6, no. 1 (2009): 1–11.

⁵ F., & Harianto, S Gultom, “Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani ,” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4, no. 2 (2021): 145–54.

⁶ S., Nur, S. M. K. M, and B. W Joko, “Pencitraan Soeharto Dalam Buku Andai Pak Harto Nyapres, Kupilih! (Kebosanan Orang-Orang Pinggiran Menanti Kemakmuran) Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis van Dijk,” *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 6, no. 2 (2017): 139–51.

Operasi ini merupakan serangkaian pembersihan orang-orang komunis dan simpatisannya di wilayah Blitar dalam upaya stabilisasi oleh pemerintah Orde Baru.⁷ Keadaan ini berkaitan erat dengan komunisme yang dianggap sebagai akar permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Orde Baru. Kedua, Blitar adalah salah satu wilayah yang mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi Jawa Timur dalam bidang KB serta menjadi objek program modernisasi oleh pemerintah Orde Baru.⁸ Program modernisasi dalam bidang pangan dan papan seperti pengenalan teknologi baru pertanian, pengelolaan koperasi desa, dan pembangunan infrastruktur publik menjadi strategi utama Orde Baru dalam meminimalisir paham kiri yang dikhawatirkan muncul dalam masyarakat pasca penumpasan orang-orang komunis.⁹ Kedua hal ini, operasi anti komunis yang memakan korban dan program modernisasi Orde Baru menjadi sebuah paradoks yang menarik. Dapat dikatakan bahwa penyingkiran komunisme menjadi awal proyek pembangunan Orde Baru.

Tulisan sejarah yang membahas mengenai Orde Baru dapat ditemukan dalam beberapa karya yang ditulis oleh Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma (2012) yang membahas mengenai propaganda serta sikap anti komunisme yang dilancarkan Orde Baru dan Abdul Syukur (2010) yang membahas mengenai pemerintahan Orde Baru dari aspek sosial, politik serta ekonomi. Selain itu karya lain seperti Ferdi Gultom dan Sugeng Hariyanto (2021) yang membahas seputar program revolusi hijau yang merubah kehidupan sosial masyarakat petani serta Muhammad Rifki Amirudin, Athifa Raissa Putri dkk (2022) yang membahas strategi dan bentuk-bentuk pembangunan pada masa Orde Baru di wilayah Blitar.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas pengalaman sehari-hari warga masyarakat yang menjalani implementasi program-program modernisasi Orde Baru. Oleh karena itu, melalui pendekatan sejarah sosial, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana arah kebijakan pembangunan desa pada masa Orde Baru? Bagaimana bentuk-bentuk penerapan kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto di Blitar Barat?

Metode Penelitian

Dalam menyusun hasil penelitian, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo dalam metode penelitian sejarah terdapat lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan

⁷ D. W. Hadi and G. Kusuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980," *Jurnal Sositologi* 1 (2012): 40–50.

⁸ Muhammad Donni Rizki, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Orde Baru Melalui Program Keluarga Berencana: Studi Kasus Di Jawa Timur Periode 1970an-1996," 2023.

⁹ Bahan Seminar Desa Pancasila (Museum Brawijaya, Malang, Indonesia: Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a, 1969).

historiografi.¹⁰ Sumber sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber tekstual, visual dan sumber lisan. Diantara sumber tekstual yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan seminar desa Pancasila tahun 1969 dan laporan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten Blitar tahun 1974 yang diperoleh dari perpustakaan Museum Kodam V Brawijaya Malang. Sebagian sumber primer ini peneliti dapat dari keikutsertaannya dalam penelitian pada tahun 2022 tentang desa Pancasila di wilayah Blitar yang dipimpin oleh bapak Sujud Purnawan Jati dengan judul Mereka yang Turut Membangun Negara: Masyarakat Desa dan Desa Pancasila di Jawa Timur Pada Masa Orde Baru (1968-1980). Terkait sumber lisan peneliti menggunakan data wawancara dari warga desa Tunjung dan Bendorejo dan beberapa perangkat desa yang mulai menjabat tahun 1969 dan 1976. Selain itu peneliti juga menggunakan data foto yang didapatkan dari arsip serta koleksi pribadi narasumber. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan kemudian melalui tahap kritik, baik intern maupun ekstern untuk mengetahui keaslian dari sumber yang telah didapatkan. Setelah melalui tahap kritik sumber, data yang telah didapat kemudian diinterpretasi untuk mengetahui maksud, tujuan serta jalannya peristiwa sejarah. Selanjutnya tahap terakhir dari penelitian ini adalah historiografi yaitu menulis peristiwa yang ada menjadi tulisan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang baku.

Hasil dan Pembahasan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa Pada Masa Orde Baru

Berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, desa merupakan komponen utama untuk mencapai ketahanan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan desa tergolong pembangunan yang cukup lambat. Kurangnya perhatian pemerintah dan politisi terhadap pembangunan di desa-desa, serta kurangnya data, tenaga ahli, dan kekurangan lainnya membuat pembangunan desa secara nasional pada periode 1945-1969 kurang terealisasi. Keadaan ini diperparah dengan kesibukan pemerintah menghadapi kelompok separatis seperti RMS, DI/TII, Permesta, dan G30S.¹¹ Singkatnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno fokus utama kebijakan pemerintah adalah stabilisasi politik yang disebabkan masalah baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mengakibatkan terlantarnya desa sebagai daerah penghasil pangan dan perkebunan (Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 16 Agustus 1970 dalam *Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun*, 1973)

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, cetakan 4. (Bentang Budaya, 2001).

¹¹ B. N Marbun, *Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000*. (Penerbit erlangga, 1988).

Berbeda dengan masa pemerintahan Presiden Soekarno, pada masa pemerintahan Orde Baru perekonomian Indonesia cenderung lebih membaik. Hal ini didukung dengan keadaan sosial politik yang cenderung lebih stabil daripada pemerintahan sebelumnya. Sikap anti-komunis serta operasi-operasi militer yang dilakukan pemerintah Orde Baru membuat masyarakat memilih untuk patuh dan enggan memiliki masalah dengan pemerintah.¹² Hal ini tentu menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Orde Baru untuk masuk dalam kehidupan masyarakat lewat Dwi Fungsi ABRI. Adanya Dwi Fungsi ABRI diharapkan akan menciptakan kedekatan sipil dan militer sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.¹³

Sikap anti komunis ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mewujudkan stabilitas sebagai bagian dari “Trilogi Pembangunan” yang digagas oleh pemerintah Orde Baru. Isi dari Trilogi Pembangunan diantaranya adalah (1) stabilitas nasional; (2) pemerataan pembangunan; dan (3) pertumbuhan ekonomi. Sementara itu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Orde Baru menggagas program jangka panjang yang biasa disebut dengan Repelita.¹⁴ Pelaksanaan Repelita dimulai dengan menasar pada pembangunan dasar di tingkat desa. Pada masa Repelita pertama hingga ketiga (1969 – 1984) tujuan utamanya adalah pertumbuhan GNP, intensifikasi pangan, dan pembangunan infrastruktur desa. Sementara itu, pada Repelita ke empat hingga ke enam (1984-1999) fokus pembangunan pemerintah adalah pada investasi dan infrastruktur di wilayah perkotaan.¹⁵

Dalam usaha mensukseskan Repelita yang pertama, pemerintah mengencarkan Revolusi Hijau yang memiliki tujuan utama tercapainya swasembada pangan. Dengan bantuan konsultan asing, pakar dalam negeri, serta para penyuluh pertanian pemerintah berusaha mendekati masyarakat untuk mengenalkan teknologi baru dalam bidang pertanian.¹⁶ Selain itu, pemerintah juga membuat program Bimas untuk mendukung program Revolusi Hijau. Terdapat dua program utama yang digagas oleh pemerintah. Pertama adalah memberikan bimbingan kepada petani terkait teknik pertanian. Kedua adalah memberikan bantuan modal kepada para petani baik dalam bentuk kredit maupun subsidi.¹⁷

¹² Nordholt, “OUTWARD Appearances: Trend, Identitas, Dan Kepentingan.” 2005....

¹³ Hadi and G. Kusuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980.”...

¹⁴ R. Rahmawati, “Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru,” *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan* IX, no. 2 (2022): 33–42.

¹⁵ S. P. Syahrie, “Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Sejarah Lontar* 6, no. 1 (2009): 1–11.

¹⁶ N. E. Patra, *Dampak Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971-1976.*, 2017.

¹⁷ Suwondo Arif, *Pembangunan Lima Tahun Di Propinsi Jawa Timur 1969-1988* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1999).

Kedua program tersebut juga didukung dengan adanya Panca Usaha Tani yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa poin dari Panca Usaha Tani diantaranya adalah pemilihan bibit unggul, irigasi, pemupukan, penggunaan obat pembasmi hama, dan sistem bercocok tanam dengan pola yang baik.¹⁸ Hal ini tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi sistem pertanian di Indonesia. Sistem pertanian yang mengedepankan prinsip intensifikasi dan mengabaikan prinsip ekologi, akan berdampak pada kerusakan ekosistem serta menciptakan ketergantungan kepada petani.¹⁹

Selain intensifikasi pangan pemerintah Orde Baru juga melakukan pengendalian populasi penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB). Berbeda dengan pemerintahan Presiden Sukarno, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengendalian populasi lewat KB sangat didukung bahkan di gencarkan secara masal. Dengan dalih kesejahteraan kehidupan rakyat dan pembangunan negara, pemerintah Orde Baru berusaha menata tubuh dan mengesampingkan hak-hak asasi perempuan. Hak-hak disini adalah hak yang secara legal mengakui setiap pasangan untuk secara bebas dan bertanggungjawab menentukan jumlah keturunan, jarak kelahiran, serta mendapatkan informasi dan sarana untuk mewujudkannya.²⁰ Namun, dalam kenyataannya lewat program safari KB, pemerintah Orde Baru berusaha menekan naiknya angka demografi. Bahkan lewat PKK para akseptor KB dijemput dari rumah ke rumah dan dibawa ke kantor desa untuk dilakukan KB. Bahkan jika terjadi penolakan, para perempuan desa tersebut tidak jarang mendapat kekerasan psikis dan di tuduh sebagai PKI.²¹

Bentuk-bentuk Penerapan Kebijakan Orde Baru di Blitar Barat

Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki kembali tatanan masyarakat Indonesia dalam tahap rangkaian pelaksanaan Repelita di wilayah Blitar, pemerintah Orde Baru membuat serangkaian Proyek yang biasa disebut dengan Desa Pancasila. Proyek Desa Pancasila adalah program modernisasi yang bertujuan untuk membumikan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila yang mana dirasa cocok untuk membawa masyarakat desa ke arah yang lebih baik.²² Nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai yang mengarah pada religiusitas, memupuk

¹⁸ E. Patra, "Dampak Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1971- 1976"...,

¹⁹ Gultom, "Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani"...,

²⁰ R. Sihite, "Kekerasan Negara Terhadap Perempuan," *Kriminologi Indonesia I Juli 3, no. 1* (2003): 33–42.

²¹ V. K Dewi and Kasuma, "Perempuan Masa Orde Baru (Studi Kebijakan Pkk Dan Kb Tahun 1968-1983)," *VERLEDEN: Jurnal Kesenjaraan* 4 (2014): 157–72.

²² *Bahan Seminar Desa Pancasila.....*,

rasa manusiawi, demokratis, persatuan, serta kesejahteraan.²³ Agaknya, dengan branding Pancasila pemerintah Orde Baru berusaha memupuk solidaritas serta meraih dukungan untuk program yang telah ada. Kenyataan ini sesuai dengan propaganda Orde Baru yang hadir untuk memurnikan Pancasila²⁴ serta alasan stabilisasi wilayah Blitar dari orang-orang komunis.²⁵ Dalam pelaksanaannya program ini menggunakan metode *Civic Mission* yang menempatkan pemerintah pusat sebagai fasilitator sedangkan pamong desa dan pemerintah setempat sebagai pelaksana utama.²⁶ Namun, adanya program ini sepertinya kurang dimengerti oleh pamong maupun pemerintah setempat. Pasalnya beberapa narasumber yang pernah menjabat tahun 1969 dan 1976 an, tidak mengetahui terkait program ini. Mereka hanya tahu terkait program yang ada dari pemerintah merupakan penerapan P4. Berdasarkan hasil analisis data, dalam bidang sosial dan ekonomi pemerintah Orde Baru melakukan sejumlah pengembangan mencakup bidang pertanian, kependudukan, dan infrastruktur. Pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan secara lebih lanjut pada bagian berikut ini.

Program Pertanian di Blitar Barat

Depresi ekonomi serta krisis pangan yang terjadi pada tahun 70 an merupakan PR awal bagi pemerintah Orde Baru. Keadaan ini diperparah dengan gejolak politik akibat penumpasan orang-orang komunis di wilayah Blitar. Hal ini tentu berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Pasalnya kestabilan politik secara tidak langsung juga akan membawa pada kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, ketidakstabilan politik di Blitar juga serta merta berdampak pada ketidakstabilan ekonomi.²⁷ Salah satu strategi pembangunan Orde Baru yang diluncurkan untuk memperbaiki ketidakstabilan ekonomi adalah meningkatkan produksi pertanian.

Dalam hal pertanian, salah satu usaha terbesar pemerintah Orde Baru adalah perbaikan Program Bimas yang telah diintrodusir oleh pemerintahan Presiden Soekarno. Penyempurnaan program ini bertujuan untuk menyediakan berbagai masukan yang disubsidi kepada para petani termasuk bibit unggul, pestisida dan pupuk.²⁸

Pada tanggal 20 September 1976, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada empat kabupaten di wilayah Jawa Timur.

²³ A. S. Utama and S. Dewi, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi." *13, no. 1* (2018).

²⁴ Hadi and G. Kusuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980"....,

²⁵ S. Utama and Dewi, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi"....,

²⁶ *Bahan Seminar Desa Pancasila*....,

²⁷ S. Utama and Dewi, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi"....,

²⁸ Abdul syukur, *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8* (PT Ichtiar Baru van Hoeve., 2010).

Penghargaan tersebut ditujukan kepada kecamatan yang dianggap berhasil dalam menjalankan program Bimas dan KB. Kabupaten tersebut diantaranya adalah Nganjuk, Lumajang, Magetan, dan Blitar. Dalam hal ini Gubernur mengapresiasi serta mengucapkan selamat atas keberhasilan para bupati dan masyarakat atas pencapaian program yang telah ada. Selain itu, untuk mencapai ketahanan pangan nasional, gubernur Jatim meminta agar disusun pola yang tepat hingga tingkat BUUD/KUD terkait pembelian hasil panen terutama padi dari petani. Hal ini karena keterlambatan BUUD/KUD terhadap pembelian hasil panen akan mengakibatkan petani menjual hasil panennya kepada tengkulak dengan harga dibawah standar.²⁹

Di wilayah Blitar Barat, pelaksanaan program Bimas dikoordinir langsung oleh pejabat desa setempat. Para pejabat desa ditugaskan untuk mendaftarkan luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengajuan dana bantuan. Selain mendapatkan bantuan pupuk, para petani juga mendapatkan uang insentif dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah ini akan cair setiap 6 bulan sekali. Setelah satu program berakhir, para pejabat desa ditugaskan untuk mendaftarkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan Bimas lainnya.³⁰ Namun, tidak semua petani mendapatkan bantuan pupuk dari pemerintah. Mereka mengaku mendapatkan benih dan pupuk dari hasil membeli di toko-toko terdekat.³¹

Meskipun begitu, wilayah Blitar Barat adalah salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dipilihnya Desa Bendorejo sebagai tempat uji coba benih di wilayah Kecamatan Udanawu. Bibit tersebut dikirim langsung dari badan riset di Bogor. Ada banyak jenis bibit pertanian yang dilakukan uji coba di desa ini. Diantara benih yang pernah dilakukan uji coba di desa ini adalah bibit padi jenis PB dan Lendah. Setelah dilakukan beberapa uji coba penanaman, penimbangan, dan peninjauan, padi yang paling berkualitas akan di sumbangkan kepada masyarakat sebagai bibit unggul. Disamping itu, masyarakat juga mendapatkan bimbingan serta peninjauan dari dinas pertanian setempat. Terkait penggunaan bibit unggul, bibit padi jenis PB merupakan jenis padi yang digemari oleh masyarakat, selain karena enak padi ini memiliki umur panen yang cenderung singkat.³² Maka tidak heran jika awal pelaksanaan Repelita, padi jenis PB merupakan padi andalan di Jawa Timur. Bahkan dengan adanya bibit padi PB, jumlah produktivitas padi di Jawa Timur meningkat menjadi dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya.³³

²⁹ B. Yudha, "Empat Kabupaten Di Jatim Terima Panji2 Penghargaan," 1976....,

³⁰ *Wawancara* Bapak Jawari (Salah Satu Pejabat Desa Tunjung), (Tunjung, February 26, 2023).

³¹ *Wawancara* Dengan Ibu Asmirah, (Tunjung, November 12, 2023).

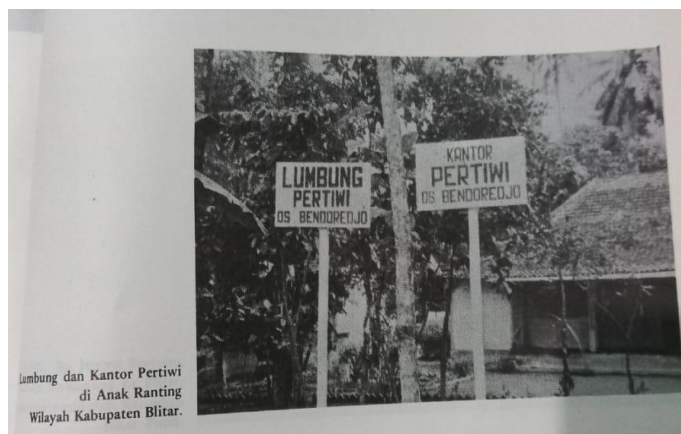
³² *Wawancara* Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo), (Bendorejo, 16 Agustus 2023).

³³ Angkatan Bersenjata, 11 April 1969, produksi beras di Jatim telah meningkat dua kali lipat.

Selain menjadi tempat uji coba pupuk dan benih, desa Bendorejo adalah salah satu desa yang konsisten serta menjadi pusat koperasi yang ada di Kecamatan Udanawu. Terbukti dengan adanya lumbung padi Pertiwi, masyarakat desa Bendorejo dapat membeli aset-aset baru untuk pembangunan fasilitas umum desa. Lumbung padi Pertiwi pada dasarnya adalah lumbung swadaya yang dibangun oleh masyarakat desa Bendorejo. Pada masa Orde Baru lumbung ini dijadikan koperasi desa oleh pemerintah kabupaten. Lumbung ini bertugas menyimpan dan membeli padi dari masyarakat. Namun karena banyak orang-orang yang memiliki lumbung sendiri di rumah, membuat masyarakat memilih menimbun padi yang dimilikinya. Akibatnya karena tidak ada yang berminat untuk menjual padi di koperasi desa, koperasi ini menjadi bangkrut dan terbengkalai.³⁴ Jika kita amati, sistem koperasi memanglah penting untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini karena koperasi merupakan wujud dari sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Keadaan ini selaras dengan kultur masyarakat desa sendiri yang kebanyakan mengedepankan asas kekeluargaan.³⁵

Atas keberhasilan yang diraih pemerintahan Desa Bendorejo maka tidak heran jika desa ini pernah menjadi juara 2 kategori desa sedang tingkat provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971.³⁶

Gambar 1. Lumbung Pertiwi Sebelum Alih Fungsi



Sumber: Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia.

³⁴ *Wawancara Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo) ...*,

³⁵ Eef Saefulloh, Wasman, and Dina, "Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan" 3, *no. 1* (2018): 430–39.

³⁶ "Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974" (Malang, 1970).

Gambar 2. Lumbung Padi Pertiwi yang sudah Alih Fungsi Menjadi Salon Kecantikan)



Sumber: Dokumen pribadi peneliti

Program pengendalian penduduk di Blitar Barat

Penduduk merupakan salah satu komponen utama dalam proses terjadinya perubahan sosial. Banyaknya jumlah penduduk tentu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Beberapa ahli ekonomi klasik mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah penduduk, stok barang-barang modal, luas tanah, sumber daya alam serta teknologi yang digunakan. Pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara tidak langsung akan menyebabkan kepadatan penduduk. Penduduk yang terlalu padat tanpa disertai pengelolaan SDM yang mumpuni akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial.³⁷ Disamping itu, ungkapan yang biasa kita dengar “akeh anak akeh rejekine” turut menjadi penyebab meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka dari itu, tidak heran jika pemerintahan Orde Baru berusaha mengendalikan tingkat populasi di Indonesia.

Salah satu program yang digencarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk menekan jumlah kepadatan penduduk adalah dengan melaksanakan program Keluarga Berencana kepada masyarakat. Program keluarga Berencana pada dasarnya mulai digencarkan oleh pemerintah Orde Baru sejak persiapan dilaksanakannya Repelita pertama yaitu ketika dibentuknya Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970, lembaga tersebut berubah nama menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk peningkatan pelaksanaan program.³⁸

Adanya badan yang menangani pertumbuhan laju penduduk ini juga tidak terlepas dari maraknya pernikahan dini yang terjadi pada tahun 1970 an yang terjadi

³⁷ D. Yunianto, “Analisis Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”, *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021): 688–99.

³⁸ A Puspitasari, “Implementasi Program Kb Di Surabaya Tahun 1974-1979.,” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 151, no. 3 (2015): 10–17.

di Jawa Timur. Pada tahun 1970, jumlah persentase anak dibawah umur yang menikah pada umur 10-14 tahun adalah 2,14% sedangkan 15-19 tahun adalah 25,10%. Tingginya persentase tersebut membuat Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Jawa Barat terkait rata-rata perkawinan rendah. Dalam hal ini rata-rata perkawinan dibawah umur banyak terjadi di pedesaan dengan jumlah 36,1% dibanding dengan daerah perkotaan yaitu sebesar 21,2 %. Fenomena seperti ini jika terus menerus dibiarkan tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.³⁹

Wilayah Blitar adalah termasuk golongan wilayah yang sukses dalam menjalankan KB. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari gubernur Jawa Timur pada tanggal 20 September 1976.⁴⁰ Meskipun begitu, terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan KB di wilayah Blitar Barat. Masih banyak perempuan yang enggan untuk di KB. Padahal para perangkat desa telah melakukan penjemputan dari rumah ke rumah. Mereka takut untuk KB dengan alasan karena mereka pekerja berat. Selain itu mereka takut karena banyak orang setelah KB yang menderita sakit.⁴¹ Bahkan, beberapa orang yang bersedia ikut KB mendapat intimidasi oleh tetangganya. Akibatnya, para perangkat desa sedikit memiliki kesulitan dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk melakukan KB.⁴² Namun para perangkat desa tersebut tidak kehabisan ide. Mereka menggunakan cara persuasif serta memberikan iming-imingi bibit kelapa gratis kepada masyarakat yang mau di KB.⁴³

Program pembangunan infrastruktur di Blitar Barat

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus utama pada masa Orde Baru. Pesatnya program yang digencarkan, dirasa perlu untuk membuat sarana penunjang agar program tersebut berjalan lancar. Maka dari itu, tidak heran jika sejak awal Repelita pemerintah Orde Baru berusaha melakukan pendekatan sektoral seperti penyediaan air bersih untuk pedesaan, program sanitasi, dan program pengembangan kampung.⁴⁴ Hal ini juga didukung dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki rata-rata 7% menjadi modal utama pemerintah dalam mendukung program-program Pembangunan.⁴⁵

³⁹ A. A. Aris Devi Puspita Sari, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini Di Jawa Timur Tahun 1974-1980 Sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk," *Journal Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (2014).

⁴⁰ B. Yudha, "Empat Kabupaten Di Jatim Terima Panji2 Penghargaan."....,

⁴¹ *Wawancara Dengan Ibu Asmirah*,...

⁴² *Wawancara Bapak Jawari (Salah Satu Pejabat Desa Tunjung)*....,

⁴³ *Wawancara Bapak Jawari (Salah Satu Pejabat Desa Tunjung)*....,

⁴⁴ Syahrie, "Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi"....,

⁴⁵ Abdul syukur, *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 8*....,

Demi kelancaran program yang ada, dukungan dari masyarakat sangatlah perlu. Dalam hal ini melalui pejabat desa, pemerintah Orde Baru berhasil mengorganisir masyarakat untuk ikut serta mensukseskan program yang ada di wilayah Blitar Barat. Bahkan dengan alasan ikut berjuang, masyarakat secara sukarela ikut mensukseskan program Repelita Orde Baru. Menurut Henk Schulte kata “Pelita” merupakan simbol modernitas dan kebaruan.⁴⁶ Seperti layaknya lampu yang menerangi kegelapan, program ini hadir sebagai solusi dari kesulitan-kesulitan yang menimpa Indonesia. Dengan ikut mensukseskan program ini secara tidak langsung masyarakat telah mendukung kebaruan dan kemodernan.

Sebagai usaha untuk intensifikasi bidang pertanian, pada masa repelita pertama pemerintahan Orde Baru membangun sebuah sumber di wilayah Manten Udanawu sebagai sumber pengairan warga. Sumber tersebut menelan biaya sejumlah Rp. 250.000.⁴⁷ Selain itu pada masa kepemimpinan Bupati Edi Slamet (1975-1980), pemerintah juga membangun sungai sebagai sodetan dari gunung kelud. Selain sebagai sudetan, sungai tersebut juga digunakan sebagai sarana irigasi persawahan masyarakat. Dengan mengadakan kerja bakti pemerintah berhasil mengorganisir pejabat desa dan masyarakat untuk ikut serta melakukan pembangunan irigasi. Mereka hanya mendapatkan sebungkus nasi serta minuman sebagai upah. Bahkan pemerintah juga mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri untuk ikut mensukseskan pembangunan. Pemerintah juga gencar membangun jalan-jalan baru sebagai akses penghubung.⁴⁸

Gambar 3. Beberapa Proyek Jalan Baru di Desa Bendorejo



Sumber: Koleksi Bapak Sarehudin

⁴⁶ Nordholt, “OUTWARD Appearances: Trend, Identitas, Dan Kepentingan.”...,

⁴⁷ “Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974.”

⁴⁸ Wawancara Terhadap Bapak Sarehudin (Sebagai Penjabat Desa Bendorejo)...

Simpulan

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Suharto. Jika pada masa pemerintahan Presiden Sukarno pembangunan di desa cenderung berjalan lambat, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pembangunan di desa cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari adanya program-program Repelita yang digagas pemerintah Orde Baru serta operasi anti-komunis yang dilakukan oleh pemerintah. Kurangnya pihak oposisi serta sifat pemerintah Orde Baru yang sangat otoriter dalam pelaksanaan program pembangunan membuat pemerintah lebih leluasa untuk mengintervensi kehidupan masyarakat desa. Dalam praktiknya di Blitar Barat, pemerintah Orde Baru berhasil mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan program-program Repelita. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran perangkat desa yang ikut andil dalam suksepsi program. Sehingga masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti perintah yang datang dari perangkat desa. Keadaan ini hampir sama dengan konsep Desa Pancasila pemerintah Orde Baru yang menempatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam suksepsi program. Namun seperti halnya istilah Desa Pancasila kurang digadang-gadang pemerintah Orde Baru. Pasalnya, para perangkat sebagai pelaksana utama program tidak mengetahui tentang program tersebut. Mereka hanya mengikuti perintah atasan dan hanya mengerti program yang dilaksanakan merupakan penataran P4. Dalam hal ini suksepsi kebijakan yang berhasil dilakukan pemerintah Orde Baru adalah perbaikan pertanian, pengendalian jumlah penduduk, serta membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di wilayah Kecamatan Udanawu. Bahkan atas keberhasilan program di wilayah ini, Desa Bendorejo hadir sebagai salah satu desa di Kecamatan Udanawu yang mendapat penghargaan tingkat provinsi dalam ajang lomba desa pada tahun 1970/1971.

Daftar Sumber

- Abdul syukur, et al. (2010). *Indonesia dalam arus sejarah jilid 8*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Aris Devi Puspita Sari, A. A. (2014). Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini Di Jawa Timur Tahun 1974-1980 Sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. *Journal Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Angkatan bersenjata, 11 april 1969, produksi beras di Djatim telah meningkat dua kali lipat.
- Bahan seminar desa Pancasila, 1969. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia
- Dewi, V. K., & Kasuma, G. (2014). PEREMPUAN MASA ORDE BARU (STUDI KEBIJAKAN PKK dan KB TAHUN 1968-1983). *VERLEDEN: Jurnal*

Kesejarahan, Vol. 4, No, 157–172.

Eef Saefulloh, Wasman, dan D. I. N. A. (2018). *PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN*. 3(1), 430–439.

NUR, 145–154. <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>

Hadi, D. W., & Kusuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Jurnal Sosioteknologi*, 1, 40–50. www.journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal_propaganda_dwiwahyohadi.pdf

Ibrahim, M. K. dan H. (2012). Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa. *Model Penataan Kampung Adat Di Kabupaten Siak*, 33–50.

Iskandar, A. H. (2020). *SDGs DESA: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yfoIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sdgs+desa+&ots=YHyMw8uFdI&sig=kj4y3F0PcflOoHPZRuRnogy2280&redir_esc=y#v=onepage&q=sdgs+desa&f=false

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah* (cet. 4). bentang budaya.

Laporan Hasil Kemajuan Repelita I Kabupaten Blitar, 1970-1974. Arsip Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, Inventarisasi 316-a. Museum Brawijaya, Malang, Indonesia.

Marbun, B. N. (1988). *Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000*. Penerbit Erlangga.

Muhammad Donni Rizki. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORDE BARU MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA: STUDI KASUS DI JAWA TIMUR PERIODE 1970an-1996* (Issue July).

Muhammad Rifki Amirudin, Athifa Raissa Putri, Nadila Farah Dibah, Rosyidul Awwab, Slamet Sujud Purnawan Jati, Arif Subekti, G. L. (2022). *Pancasila Village: A New Order Strategy for Village Prosperity in Blitar, East Java, 1968 – 1985*. 61–69. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-63-3>

Nordholt, H. S. (dkk). (2005). *OUTWARD appearances: trend, identitas, dan kepentingan*. LKiS.

Nur, S., Joko, B. W., Boja, S. M. K. M., & Tengah, J. (2017). Pencitraan Soeharto dalam Buku Andai Pak Harto Nyapres, Kupilih! (Kebosanan Orang-Orang Pinggiran Menanti Kemakmuran) dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis van Dijk. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 139–151.

Patra, N. E. (2017). *Dampak revolusi hijau pada masa orde baru di kabupaten gunungkidul tahun 1971-1976*. 151–173.

- Pristiandaru, D. L. (2023). *SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, dan Tujuannya*. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2023/06/08/120000486/sdgs-desa--pengertian-peraturan-dan-tujuannya?page=all>
- Puspitasari, A. F. (2015). Implementasi Program Kb Di Surabaya Tahun 1974-1979. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 151(3), 10–17.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, IX (2), 36–42.
- Sihite, R. (2003). Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Jurnal Kriminologi Indonesia I Juli*, 3(I), 33–42.
- Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun*. (1973). C.V. Sumadajaja.
- Suwondo Arif, S. (1999). *Pembangunan Lima Tahun Di Propinsi Jawa Timur 1969-1988*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Syahrie, S. P. (2009). Politik Pembangunan Orde Baru: Industrialisasi, Swastanisasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Sejarah Lontar*, 6(1), 1–11.
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*. 13(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/7y9wn>
- Yudha, B. (1976, September). *Empat Kabupaten di Jatim Terima Panji2 Penghargaan*.
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>
- Zayanti Mandasari, Djaenuri, A., & Alamsyah, M. N. (2011). Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. *Modul*, 03(02), 1–34.